

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROGRAM *SMART*
*VILLAGE***

**(STUDI DI DESA MADUKORO, KECAMATAN KOTABUMI UTARA,
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

(Skripsi)

Oleh

MILENIA FEBI SANTIKA

NPM 1946011013



**SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROGRAM *SMART VILLAGE*

(Studi Di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

Milenia Febi Santika

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Madukoro dalam mensukseskan penerapan program berbasis digital yaitu *smart village*. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Hal ini berhubungan dengan pengamatan yang akan dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Desa Madukoro dalam penerapan program *smart village* yang dilihat berdasar empat indikator, pertama Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kedua partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, ketiga partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, kemudian menentukan informan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan lima masyarakat Desa Madukoro sebagai penerima manfaat program *smart village* serta dua informan dari pihak pemerintah desa dengan tujuan mendapatkan informasi se-objektif mungkin. Penelitian ini kemudian mendapati bahwa berdasarkan fakta dilapangan bahwa masyarakat belum berpartisipasi secara maksimal dalam penerapan program *smart village*, dari empat indikator tersebut, masyarakat cenderung berpartisipasi ketika hal tersebut memberikan manfaat bagi mereka, dalam hal ini berkaitan dengan indikator pengambilan manfaat. Selain itu kecendrungan masyarakat hanya akan terlibat ketika mendapat dorongan dari Pemerintah Desa.

Kata Kunci : Smart Village, Partisipasi, Masyarakat.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN PROGRAM IMPLEMENTATIONS SMART VILLAGE

***(Study in Madukoro Village, North Kotabumi District, North Lampung
Regency)***

By

Millenia Febi Santika

The purpose of this study is to see how the involvement of the Madukoro Village community is in the successful implementation of digital-based programs, namely smart village. This study uses a qualitative descriptive research method because the problems relate to humans which fundamentally depend on observation. This relates to the observations that will be made to see how the participation of the Madukoro Village community is in implementing the smart village which is seen based on four indicators, first community participation in decision making, second community participation in program implementation, third community participation in taking benefits and community participation in the evaluation stage. The researcher determined the informants through a purposive sampling technique involving five Madukoro Village communities as beneficiaries of the smart village as well as two informants from the village government with the aim of obtaining information as objectively as possible. This research then found that based on facts in the field that the community had not participated optimally in implementing the smart village, of the four indicators, people tend to participate when it benefits them, in this case related to the indicator of taking benefits. In addition, the tendency for the community to be involved is only when they receive encouragement from the Village Government.

Keywords: Smart Village, Participation, community.

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROGRAM *SMART*
*VILLAGE***

**(STUDI DI DESA MADUKORO, KECAMATAN KOTABUMI UTARA,
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

Oleh :

MILENIA FEBI SANTIKA

1946011013

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENERAPAN PROGRAM SMART VILLAGE
(STUDI DI DESA MADUKORO,
KECAMATAN KOTABUMI UTARA,
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

Nama Mahasiswa : **Milenia Febi Santika**

No Pokok Mahasiswa : **1946011013**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

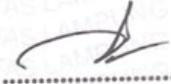


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19700401 200501 2 003

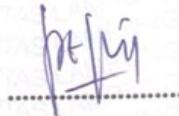
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Anita Damayantie, M.H.



Penguji Utama : Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Agustus 2023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Milenia Febi Santika dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2000. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara, dari pasangan Alm Bapak Abdussamad dan Ibu Rosidah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 02 Batu Raja pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Plus Walisongo dan lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 02 Kotabumi lulus pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PARALEL. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif tergabung dalam organisasi HMJ SOSIOLOGI FISIP UNILA sebagai anggota divisi Minat dan Bakat. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan di Balai Pemerintahan Desa Di Lampung pada Sub Bagian administrasi.

MOTTO

"Orang yang paling penyantun diantara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun ia sanggup untuk membalasnya."

(Hadist Riwayat Al Anshari)

"Tolonglah diri kamu sendiri, jadikan dirimu merupakan pribadi yang hebat sehingga semakin banyak orang yang bisa kamu tolong."

(anonymous)

"Maaf, Tolong dan Terimakasih"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati serta rasa syukur kepada Allah SWT, maka penulis persembahkan karya ilmiah saya kepada:

ALM ABAH TERCINTA ABDUSSAMAD & EMAK ROSIDAH

Untuk semua yang telah kalian berikan cinta, kasih sayang, do'a, restu, pengorbanan dan perjuangan serta harapan terkahir kalian kini sudah mencapai akhir manis yang sesungguhnya, terimakasih aku ucapkan kepada kedua orangtuaku tersayang karena berkat kalian aku bisa sampai ada di tahap ini.. Abah terimakasih sudah bertahan di nafas terakhirmu kala itu, untuk menyampaikan harapan karena ingin melihat putri bungsumu mencapai gelar sarjana, kini putri kecilmu sudah menuntaskan apa yang telah kita nanti selama ini. Emak terimakasih sudah bertahan menggandeng tanganku untuk menghantarkan kesuksesan. Aku bersyukur karena ditakdirkan menjadi anak bungsu dari emak dan abah...

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas yang sangat berjasa dalam membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini

Serta semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA
KELUARGA BESAR JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA



Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Program *Smart Village* (Studi Di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara)**". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat, segala petunjuk dan pertolongan yang diberikan membuat penulis mampu memperoleh pencapaian pada titik ini.
2. Kedua orang tua, yaitu Alm Abah Abdussamad dan Emak Rosidah, terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, do'a, perjuangan, pengorbanan serta jerih payah kalian sampai aku bisa ada ditahap ini, salah satu harapan terakhir kalian kini sudah mewudkam apa yang kita nanti selama ini, abah sekarang bisa tersenyum bahagia disana karena semua anak abah sudah mencapai gelar sarjana, untuk emak tersayang semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, seta dilimpahkan rahmat, keberkahan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat Aamiin, aku bersyukur telah ditakdirkan menjadi anak dari emak dan abah.

3. Teruntuk keluarga besarku yukaci, uni, cik maya, bang buyung dan bang yasir, terimakasih telah menjadi bagian dari segala proses kehidupanku, terimakasih menjadi support terbaik dikala dunia begitu kelam, kalian adalah salah satu tempat ternyaman untuk aku pulang, adik bungsumu ini sangat menyayangi kalian semua.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu segala urusan akademik penulis.
7. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan, segala pembelajaran, nasihat, dorongan semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti selama perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
10. Bapak Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terimakasih atas semua ilmu, arahan, masukan, serta bimbingan kepada peneliti, semoga bapak selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT.
11. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang ibu kerjakan.

12. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A. selaku Dosen pembahasa yang selalu bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan sabar, serta masukan, saran dalam proses penyelesaian skripsi, semoga disetiap langkah ibu selalu diiringi keberkahan oleh Allah SWT.
13. Seluruh Dosen Sosiologi tercinta, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan dan segala nasihat yang telah kalian berikan.
14. Staff jurusan Sosiologi, terimakasih karena telah membantu dalam mengurus segala keperluan administrasi.
15. Kepada seluruh informan yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data terkait penelitian yang dilakukan. sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
16. Kepada pasangan terbaikku Bambang Kurniawan, S.I.P terimakasih unruk semua kisah yang telah kamu ukir di cerita hidupku, segala proses perjuangan sedari 2015 hingga saat ini tak pernah hentinya kamu selalu siap sedia untukku. Semoga apa yang kita semogakan menjadi kenyataan Aamiin.
17. Kepada anak buluku adek, adi, burhan dan nurul, terimakasih nak sudah hadir dan selalu menyemangati segala proses pengerjaan skripsi ini dan menjadi sahabat terbaik di rumah, maafin eomma adek dan adi karena belum bisa ada disaat detik-detik terakhir hidup kalian, tenang disana ya anak buluku aku sayang kalian.
18. Kepada teman-teman dan sahabatku selama perkuliahan *Secret Family*, terimakasih atas dukungan, doa, dan semangat yang telah kalian berikan. Semoga kelak kita data menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.
19. Serta kepada seluruh teman-teman sosiologi 19, terimakasih untuk segalanya semoga kita semua menjadi orang sukses.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2023

Milenia Febi Santika

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Berpikir	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Partisipasi Masyarakat.....	13
2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	13
2.1.2 Jenis Partisipasi Masyarakat	16
2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	18
2.2 Tinjauan <i>Smart Village</i>	19
2.1.1. Pengertian <i>Smart Village</i>	19
2.1.2. Sasaran Program <i>Smart Village</i>	20
2.1.3. Metode Pelaksanaan <i>Smart Village</i>	21
2.1.4. Prinsip Umum <i>Smart Village</i>	22
2.1.5. Kriteria dan Tujuan <i>Smart Village</i>	24
2.2. Penelitian Terdahulu	30
III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Tipe Penelitian Deskriptif	37
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Teknik Penentuan Informan	40
3.5 Jenis Data	41

3.6	Teknik Pengumpulan Data	42
3.7	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
3.8	Teknik Keabsahan Data	46
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1	Gambaran Umum Desa Madukoro.....	48
4.1.2	Keadaan penduduk Desa Madukoro	51
4.2	Hasil Penelitian.....	55
4.2.1	Deskripsi Informan.....	57
4.2.2	Jenis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pada Penerapan Program <i>Smart Village</i>	60
4.2.3	Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pada Penerapan Program <i>Smart Village</i>	65
4.2.4	Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Manfaat pada Penerapan Program <i>Smart Village</i>	70
4.2.5	Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pada Penerapan Program <i>Smart Village</i>	76
4.2.6	Distribusi Jawaban Informan Masyarakat	82
4.3	Pembahasan.....	84
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Pekerjaan Masyarakat Desa Madukoro	4
2. Data Pendidikan Masyarakat Desa Madukoro	5
3. Gambar 1. 3 Kerangka Pikir (diolah oleh peneliti, 2023).....	12
4. Gambar 4.1 Peta Rupa Bumi dan Tata Ruang Desa Madukoro	48
5. Gambar 4.2 Tata Ruang Desa Madukoro.....	48
6. Gambar 4.3 Struktur Smart People Dalam Penerapan <i>Smart Village</i>	55
7. Gambar 4.4 Rapat Koodinasi Ketua RT Dan RW	59
8. Gambar 4.5 Layanan Mandiri	67
9. Gambar 4.6 Promosi Digital <i>Smart Village</i> Desa Madukoro.....	70
10. Gambar 4.7 Monitor <i>Smart Village</i> Desa Madukoro.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	30
2. Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Madukoro	51
3. Tabel 4.2 Data Usia Penduduk	52
4. Tabel 4.3 Data Pendidikan	53
5. Tabel 4.4 Distribusi Jawaban	76

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan. Dalam hal ini terdapat pada berbagai aspek sosial penggunaan teknologi oleh manusia dalam upaya menyelesaikan pekerjaan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia (SDM) dalam memasuki era globalisasi ini. Teknologi informasi tidak dipungkiri memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Teknologi informasi kini telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia.

Globalisasi saat ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia, terutama karena terus berkembangnya teknologi. Pengaruh tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu dalam permasalahan ini sangat menarik apabila dikaji lebih dalam dengan menggunakan kajian sosiologi, karena dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini yang kemudian memunculkan kemungkinan adanya pengaruh yang diberikan terhadap masyarakat, terutama dari segi perubahan sosial. Dalam penelitian ini perubahan yang dimaksud adalah beralihnya bentuk partisipasi konvensional dengan memanfaatkan sebuah kemajuan teknologi sebagai perantara.

Jika dilihat dari segi perubahan sosial hubungan antara teknologi dan pemerintah yaitu program pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah *E-government*. Penerapan *E-government* merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi *E-government* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya.

Tugas pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi juga memberikan dampak bagi pemerintah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan maka hal ini melahirkan penerapan *Electronic Government* dalam lingkup pemerintahan.

E- Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan praktik pemerintah yang lebih efisien dan efektif, serta pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah meningkat. *E-Government* dapat memberikan manfaat dalam hal layanan masyarakat berupa pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh kapanpun dan dimanapun.

Adanya *E-Government* bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama. (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021). Penerapan *E-Government* di Indonesia yang sejalan dengan *smart city*, dalam konteks lingkup yang lebih kecil lagi yaitu desa, beberapa desa di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep desa berbasis teknologi informasi yang disebut dengan *Smart Village* atau desa cerdas.

Konsep *Smart Village* secara umum ialah suatu desa dapat dikatakan sebagai desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam berbagai aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu desa yang menjadi lokus program *Smart Village* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/71/V.12/HK/2021 tentang penetapan desa lokus *Smart Village* di Provinsi Lampung. Desa dengan jumlah penduduk sekitar 7740 jiwa ini mendapat amanah menjadi salah satu desa lokus program *Smart Village* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dari penetapan ini tentu diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di Desa Madukoro yang tentunya membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat desa (Madukoro *Smart Village*, 2021).

Konsep *Smart Village* sendiri dipahami oleh para ahli sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga menghasilkan kemanfaatan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat pedesaan. Kemudian Definisi Operasional dari *Smart Village* menurut Bappenas (2021) adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan

teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pemerintah Provinsi Lampung sangat memahami isu strategis pengembangan program *Smart Village* yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Program “Rakyat Lampung Berjaya” yang terdiri dari 33 janji kerja salah satunya yaitu menerapkan program *Smart Village* yang yang tertuang pada janji kerja ke-30, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa, memfasilitasi digitalisasi administrasi desa dan *e-participation*; dan melibatkan masyarakat hingga pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi *online* dan atau aplikasi. Penerapan Program *Smart Village* di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program *Smart Village* di Provinsi Lampung. Desa Madukoro adalah desa di Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Kotabumi Utara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan wiraswasta. Hal ini dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Data Pekerjaan Masyarakat Desa Madukoro

(Sumber : Madukoro *Smart Village*, 2021)

Kemudian jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas masyarakat Desa Madukoro rata-rata memiliki pendidikan terakhir SLTA dengan presentase 36,92%. Hal ini data dilihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Data Pendidikan Masyarakat Desa Madukoro

(Sumber : Madukoro *Smart Village*, 2021)

Penerapan program *Smart Village* di Desa Madukoro merupakan wujud pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan suatu kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat sehingga mendorong setiap daerah untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Penerapan program *Smart Village* di Desa Madukoro ini akan dilihat apakah masyarakat bisa memahami perubahan zaman di era digital ini dalam penerapan program *Smart Village* dan seperti apa bentuk partisipasi masyarakat dalam program *Smart Village*. Namun, hal tersebut belum tentu bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat luas, dari keterbatasan tersebut dibuatkan solusi dengan penerapan program *Smart Village* sebagai media untuk memudahkan masyarakat untuk administrasi layanan desa.

Penerapan program *Smart Village* berimplikasi bahwa partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam upaya membangun desa dengan konsep/model *Smart Village* sangatlah penting, karena tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu kepada bagaimana konsep *Smart Village* mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, tentu hal ini membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat desa serta bagaimana menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya inovasi dalam penerapan suatu layanan berbasis digital serta usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar lebih mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat (Nugroho dan Pratama, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village* ini diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting. Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini maka dirasa perlu untuk merealisasikannya dalam sebuah program yang dikenal dengan *Smart Village*.

Sehingga dapat mendukung fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu, diperlukan media yang mudah diakses maka kemudian masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program-program yang ada dalam program *Smart Village* ini, serta ada beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.

Ketika berbicara mengenai upaya pembangunan di desa, tentu tidak lepas dari hambatan dan permasalahan, mulai dari masalah pelayanan pemerintahan di desa, masalah sumber daya manusia di desa, serta ekonomi dan budaya masyarakat di desa. Kemudian penelitian ini akan melihat atau memfokuskan pada sudut pandang permasalahan sosial yang ada didalamnya termasuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan program *Smart Village*.

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat desa dalam penerapan program *Smart Village* ini, berdasarkan pada renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2019-2024, terdapat permasalahan yang kemudian berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penerapan *Smart Village* di Provinsi Lampung, di mana dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, kapasitas desa dan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatas dan kurang maksimal karena keterbatasan literasi digital serta minat masyarakat yang masih kurang antusias dalam penerapan program ini, serta kurangnya kapasitas aparatur dan kader lembaga masyarakat dalam implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan hal tersebut diikuti dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentunya ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa yang kemudian menerapkan program *Smart Village*.

Berkaitan antara partisipasi masyarakat dengan penerapan digitalisasi di desa, dirasa bahwa masalah yang paling mencolok adalah literasi digital masyarakat yang cenderung masih rendah sehingga pemanfaatan teknologi masih sebatas sosial media maupun hiburan saja. Masyarakat perlu didukasi tentang pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan peralatan digital terutama *smartphone* untuk mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan berbasis digital yang dihadirkan oleh pemerintah desa.

Masalah selanjutnya ialah masih cukup banyak daerah yang belum terjangkau sinyal (*blind-spot*) sehingga akses jaringan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena infrastruktur yang belum memadai, serta sulitnya akses untuk pembangunan (Nairobi & Arif Darmawan, 2020). Tidak kalah penting juga efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kapasitas desa serta pemerintahan desa dalam upaya memberikan layanan serta peningkatan literasi digital masyarakat di desa masih kurang baik. Hal ini tertera pada rencana strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung 2020-2024 yang memengaruhi respon antusias masyarakat desa dalam menyambut program ini yang dirasa masih kurang, serta kesiapan pemerintah desa dalam menyambut program *Smart Village* ini pun masih belum maksimal, baik dalam hal kualitas SDM pemerintah desa, pendanaan serta infrastruktur di desa yang belum memadai. Maka dari itu, program ini belum bisa diterapkan di seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/71/V.12/HK/2021 baru terdapat 130 desa sasaran program *Smart Village* dari 2.435 desa yang ada di Provinsi Lampung, hal ini yang didasarkan pada:

1. Usulan pemerintah kabupaten melalui Dinas/Badan Daerah Kabupaten yang mengurus Desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Usulan memperhatikan Index Desa Membangun (IDM) yaitu desa mandiri dan maju.
2. Balai desa/kantor desa harus memiliki koneksi internet yang baik.

3. Memiliki kelembagaan masyarakat yang potensial dalam implementasi program *Smart Village*.
4. Diprioritaskan bagi desa yang sudah memiliki *website* desa dan sudah menerapkan pelayanan administrasi berbasis IT.
5. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana Desa dalam mendukung pelaksanaan *Smart Village*.

Kemudian peneliti mengkaji masalah ini menggunakan Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff (1997) dengan empat indikator yaitu :

1. *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan).
2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan).
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat).
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Berdasarkan teori yang digunakan bahwa ada empat indikator dalam melihat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village* ini, kesuksesan penyelenggaraan program ini tentu sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Namun, dalam penerapan program *Smart Village* ini peneliti menemukan masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dirasa dapat menghambat penerapan program ini, termasuk masalah yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam upaya penerapan program *Smart Village* ini.

Oleh karena itu dalam penerapan program *Smart Village* ini bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat setelah diterapkannya program ini, apakah diterima dengan baik supaya bisa mengembangkan desa ke arah digitalisasi sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Program *Smart Village* (Studi Kasus Desa Madukor, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana jenis-jenis partisipasi masyarakat Desa Madukoro dalam penerapan program *Smart Village*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diambil dari rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui jenis partisipasi masyarakat Desa Madukoro dalam penerapan program *Smart Village*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat,yaitu :

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa.

1.5 Kerangka Berpikir

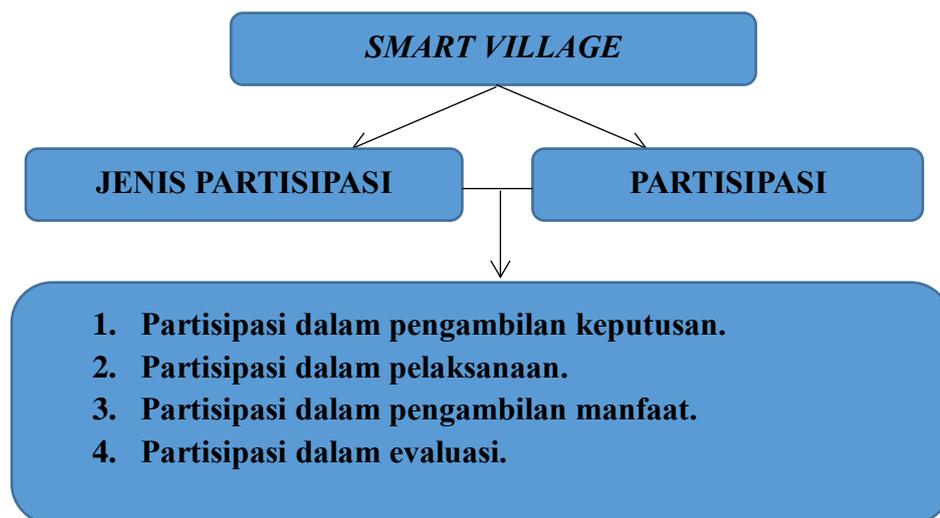
Smart Village memiliki konsep bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena alokasi, gelontoran dana yang di dapat oleh desa dapat memberikan ruang untuk itu semua. Jika ditarik benang merah dari tujuan itu semua, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Selain itu, dengan mengembangkan konsep *Smart Village*, Pemerintah desa dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Bisa lebih mengatur sumber daya desa, dengan tujuan untuk lebih memberikan dan mempermudah pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Dalam membangun *Smart Village*, dibutuhkan program yang terencana dan partisipasi masyarakat, dari segala sektor yang ada di desa tanpa membedakan golongan atau kelompok tertentu. Masalahnya konsep inti tidak selamanya bergantung kepada kecanggihan teknologi semata, salah satu faktor yang menentukan adalah cara berpikir atau paradigma masyarakat dalam memandang desa di masa depan. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk melahirkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya inovasi dalam usaha dengan memanfaatkan pengetahuan serta kompetensi yang dimilikinya.

Adapun pengembangan *Smart Village* harus dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu partisipasi dari masyarakat serta lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau “*tools*” dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan sebagai tujuan atau “*goals*”.

Namun dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi seluruh elemen desa di Provinsi Lampung dalam upaya penerapan program *Smart Village*, khususnya terkait partisipasi serta peran masyarakat dalam upaya mensukseskan program *Smart Village* di Desa Madukoro, dalam hal ini peneliti mengkaji permasalahan ini menggunakan Teori Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 60) dengan empat indikator yaitu :

1. *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan).
2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan).
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat).
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).



Gambar 1. 3 Kerangka Pikir (diolah oleh peneliti, 2023).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat Zamroni (2011) mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara di dalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan.

Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Selain pendapat di atas, Mulyadi (2009) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut.

Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan apa yang disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. (Haliim 2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya bisa mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, komunikatif, demokratis, bertanggung jawab, dan transparan (Rahman 2016).

Menurut Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Menurut Santoso Sastropetra (1998) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran di sertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Maripahh, 2017).

Menurut Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati, 2019), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Sastropetro (1998) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata (Minahasa 2007).

Menurut Conyer Diana (1994:154), ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Masyarakat akan mengetahui seluk-beluk dari program pembangunan dan akan merasa memilih terhadap pembangunan tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa masyarakat memiliki suatu hak demokrasi bilamana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan aspirasi untuk menentukan jenis pembangunan yang dilaksanakan.

Dari segala pendapat yang ada mengenai partisipasi masyarakat dapat ditarik benang merah bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu untuk memberikan pendapat dan tenaga baik secara berkelompok ataupun perindividu dalam suatu kegiatan baik formal maupun nonformal serta harus di dukung dengan kesadaran dari dalam dirinya ataupun dorongan dari orang lain untuk ikut terlibat dalam memberikan aspirasi.

2.1.2 Jenis Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan).

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan).

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat).

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya

Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah konsep partisipasi dari John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. Sebenarnya Cohen dan Uphoff tidak pernah secara jelas mendefinisikan bagaimana pengertian partisipasi menurut mereka. Akan tetapi dalam jurnal mereka yang berjudul *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity* (1980), partisipasi yang mereka maksud kurang lebih memiliki pengertian yaitu keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya serta usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pembagian hasil dan evaluasi program.

Bagi mereka berdua (1980), partisipasi bukanlah suatu hal yang bersifat kuantitatif. Maka dari itu mereka berasumsi bahwa partisipasi tidak dapat diukur. Cohen dan Uphoff tidak setuju dengan teoritis lainnya ketika memberlakukan partisipasi sebagai sesuatu yang dapat diukur. Dalam melihat partisipasi, Cohen dan Uphoff membayangkannya sebagai suatu rubrik yang terdiri dari kumpulan garisgaris yang saling menjelaskan satu sama lainnya. Kemudian, Cohen dan Uphoff memberikan empat jenis dalam proses partisipasi menurut mereka. Jenis partisipasi tersebut antara lain yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; (3) partisipasi mendapatkan manfaat; dan (4) partisipasi dalam evaluasi.

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Penelitian ini, konsep yang digunakan adalah konsep partisipasi dari John M. Cohen dan Norman T. Uphoff, Sebenarnya Cohen dan Uphoff tidak pernah secara jelas mendefinisikan bagaimana pengertian partisipasi, menurut mereka partisipasi yang dimaksud kurang lebih memiliki pengertian yaitu keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya serta usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pembagian hasil dan evaluasi program. Bagi Cohen dan Uphoff partisipasi bukanlah suatu hal yang bersifat kuantitatif. Maka dari itu mereka berasumsi bahwa partisipasi tidak dapat diukur. Cohen dan Uphoff tidak setuju dengan teoritis lainnya ketika memberlakukan partisipasi sebagai sesuatu yang dapat diukur dengan melihat partisipasi, Cohen dan Uphoff membayangkannya sebagai suatu rubrik yang terdiri dari kumpulan garisgaris yang saling menjelaskan satu sama lainnya. Kemudian, Cohen dan Uphoff memberikan empat jenis dalam proses dan faktor partisipasi menurut mereka jenis partisipasi tersebut antara lain yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan;
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan;
- 3) Partisipasi mendapatkan manfaat dan
- 4) Partisipasi dalam evaluasi

Slamet dalam Theresia (2014: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Goldsmith dalam Ndraha (1987: 105), menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.

2.2 Tinjauan *Smart Village*

2.1.1. Pengertian *Smart Village*

Menurut Bappenas (2021) *Smart Village* adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Hal ini berimplikasi bahwa, membangun desa dengan konsep/model *Smart Village* tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu kepada bagaimana konsep *Smart Village* mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya inovasi dalam usaha (Nugroho & Pratama, 2019).

Selain itu, untuk dapat menerapkan konsep *Smart Village*, *stakeholder* perlu memperhatikan suatu mata kunci utama dimana perlu dikembangkan strategi untuk menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya *Smart Village* ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumber daya desanya secara efektif, efisien dan *sustainable*.

2.1.2. Sasaran Program *Smart Village*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 Tentang Penerapan Program *Smart Village*, sasaran *Smart Village* adalah desa atau nama lainnya dalam pengertian desa, di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan secara bertahap, dan berkelanjutan, sehingga dalam penentuan dan penetapan jumlah lokasi (Lokus) desa sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan: Usulan pemerintah Kabupaten melalui Dinas atau Badan Daerah Kabupaten yang mengurus desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung.

Usulan memperhatikan Index Desa Membangun (IDM) dan pertimbangan Tim Pendamping Desa. Usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, terkait penyelarasan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial dan memperhatikan keberadaan Perpustakaan Desa, berikut usulan terkait penyelarasan Program Transformasi Perpustakaan :

1. Usulan masyarakat melalui Pemangku Kepentingan di tingkat Provinsi Lampung antara lain melalui media Musrenbang, Penjaringan Aspirasi, rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lain-lain.

2. Hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan agenda kerja, program kegiatan di Pusat, Provinsi, dan atau Kabupaten.
3. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelaksanaan *Smart Village*.
4. Lokasi Desa lokus/sasaran *Smart Village* ditentukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

2.1.3. Metode Pelaksanaan *Smart Village*

Berdasarkan kutipan *master plan Smart Village* Provinsi Lampung tahun 2020, skema pemikiran metode pelaksanaan yang akan dilakukan mengacu pada pendekatan sebagai berikut:

1. *Comprehensive Approach*, yang merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan menyeluruh dari aspek yang terkait untuk perencanaan, yaitu diaplikasikan melalui pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai aspek ada sebagai bagian proses perancangan secara proporsional sesuai kebutuhan.
2. *Integrated Approach*, yaitu merupakan pendekatan untuk memadukan berbagai kepentingan pihak aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi rancangan pra desain penataan. Hal ini akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan diskusi maupun koordinasi dengan pihak yang berkepentingan (pelaku, pemangku kepentingan di daerah, maupun narasumber) yang akan dilakukan selama waktu perencanaan. Dalam kesempatan tersebut diupayakan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan mutu hasil rancangan.
3. *Realistic Approach*, Pendekatan yang memadukan antara pertimbangan ideal dan pragmatis agar diperoleh pemecahan atau arahan perencanaan pra desain yang implementatif dan kontekstual.

2.1.4. Prinsip Umum *Smart Village*

Berdasarkan prinsip umum *Smart Village*, dalam keterangan *master plan Smart Village* Provinsi Lampung 2020 terdapat prinsip-prinsip umum *Smart Village* yaitu :

- a. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus dapat dipergunakan oleh desa sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan publik dan mempertanggung jawabkan hasil-hasil pembangunan Desa dan pelayanan publik.
- b. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus memudahkan dan dapat dimanfaatkan pemerintah supra desa (Provinsi dan Kabupaten) untuk memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap memberikan kebebasan desa maupun Kabupaten menentukan data-data lain yang memang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan desa yang sangat bervariasi dalam menyediakan berbagai jenis data dan informasi dengan kualitas yang dapat diterima.
- c. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus memperkuat dan mengonsolidasikan sistem informasi yang sudah ada atau sedang dibangun, baik ditingkat Desa, Kabupaten, hingga Provinsi. Prinsip Khusus *Smart Village* Berangkat dari apa yang dimiliki desa: Implementasi sistem dimulai dengan memetakan jenis pelayanan yang diberikan, sistem yang sudah ada dan diterapkan di desa, dan apa yang menjadi potensi desa yang dapat mendukung penerapan pengembangan sistem *Smart Village* dan sistem informasi desa lainnya yang ada di desa. Berdasarkan hal tersebut, berikut yang menjadi prinsip khusus *Smart Village*:

- 1) Informasi data generik minimum: Semua desa mengelola jenis data yang sama diluar dari daftar generik minimum tersebut, desa-desa dapat saja mengelola informasi dan data lain sesuai dengan kewenangannya yang dirasa perlu, misal potensi wisata desa dan sebagainya.
- 2) Berbasis Platform: Sistem dan aplikasi *Smart Village* berbasis platform yang sama sehingga mudah dikembangkan desa dan mudah dikembangkan dari segi teknologi informasi.
- 3) Rutin: Memastikan data diperbarui secara rutin atau bahkan real-time. Staf pengelola yang bertanggungjawab bersifat tetap.
- 4) Keberlanjutan : Kebutuhan terhadap data bersifat terus-menerus sehingga pengembangan sistem *Smart Village* harus disertai komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya, termasuk komitmen daerah untuk mereplikasinya.
- 5) Mudah: Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya desa sehingga mudah untuk dikelola. Sistem juga perlu dirancang sedemikian rupa supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 6) Nilai Tambah: Sistem dan aplikas TIK yang digunakan dalam *Smart Village* memberikan nilai tambah dibandingkan sistem informasi desa tradisional manual, antara lain memungkinkan adanya interkoneksi elektronik tanpa menghilangkan aspek keamanan data yang bersifat rahasia atau pribadi.
- 7) Satu data untuk semua (*entry*): Menganut prinsip open data, dibarengi dengan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.
- 8) *User friendly*: Dikembangkan secara bertahap yan tentunya dengan memperhatikan kapasitas perangkat desa dan masyarakat pengguna informasi.

(Sumber petunjuk laknis *Smart Village provinsi lampung 2020*).

2.1.5. Kriteria dan Tujuan *Smart Village*

Dalam *master plan Smart Village* Provinsi Lampung tahun 2020 terdapat 4 (empat) elemen pokok *Smart Village*, yakni *smart community*, *smart economy*, *smart government*, dan *smart environment*. Keempat elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart Village* Lampung berupa “*smart relationship*” yakni keterjalinan konstruktif yang muncul dari relasi keempat elemen *Smart Village* tersebut. Dengan demikian, sinergisitas yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun keempat konsep dalam *Smart Village* Lampung adalah sebagai berikut :

1. *Smart Community*

Masyarakat memiliki peran penting dalam konteks *Smart Village*. Masyarakat tidak hanya sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga sebagai sebuah kesatuan yang memiliki kehendak dan tujuan untuk menentukan arah kehidupannya. Atas dasar itulah, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai kedudukan dan perannya di desa. Masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dalam proses pengembangan desa sehingga akan menjadi pihak yang menerima manfaat. Realitasnya, masyarakat dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan masalah, baik yang berasal dari internal seperti rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan, maupun yang berasal dari eksternal. Kondisi tersebut berimplikasi kepada rendahnya kesadaran masyarakat akan peran yang harus dijalankan dalam struktur desa, sehingga masyarakat dalam banyak kasus menjadi pihak yang pasif dan tidak menerima manfaat dari adanya pengembangan desa.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus disikapi oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pengembangan desa. Teknologi informasi hadir sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat yang dituntut berkontribusi dalam pengembangan desa. Implikasinya, masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks sosial dan pemerintahan desa. Dengan begitu masyarakat tidak hanya akan diuntungkan dari adanya teknologi informasi, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas masyarakat akan menerima keuntungan dari adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks sosial dan pemerintahan di desa.

2. *Smart Economy*

Konsep *Smart Village* adalah desa yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. *Smart economy* atau ekonomi pintar (inovasi dan persaingan) ditandai dengan semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.

Perwujudan dari *smart economy* adalah apabila desa-desa di provinsi Lampung mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan kegiatan ekonominya. Pada umumnya *smart economy* merupakan sesuatu yang dibuat dan dicapai dengan cara – cara cerdas oleh institusi/lembaga, yang mana menghasilkan gagasan baru dan mendapat banyak keuntungan dengan biaya lebih sedikit.

Bruneckiene (2014) mendefinisikan *smart economy* adalah ekonomi yang mana ditandai dengan karakteristik sebagai berikut : inovatif, produktif, digital, integral green, bertanggung jawab secara sosial, jaringan dan respon yang cepat. Pencapaian karakteristik kualitatif dari *smart economy* dalam perekonomian daerah memungkinkan desa untuk menjadi lebih layak, transparan, dapat diakses, tumbuh dengan cepat dan menguntungkan untuk lingkungan disekitarnya serta generasi yang akan datang.

Jadi *smart economy* dianggap penting dalam persektif hari ini yang bertujuan untuk memastikan daya saing ekonomi suatu negara tidak hanya pada periode sekarang tapi untuk yang masa akan datang dalam skala global, adapun untuk menghasilkan daya saing secara ekonomis tersebut, maka masyarakat desa dibutuhkan suatu perubahan mindset dalam pengelolaan potensi dan karakteristik daerah. Salah satu upaya dalam perubahan mindset dari masyarakat desa tersebut adalah dengan melakukan upaya-upaya menggalakan program inkubasi desa. Dimana inkubasi desa merupakan suatu jenis kegiatan yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan atau pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Adapun, jasa atau bantuan yang pada umumnya diberikan oleh inkubator bisnis yaitu meliputi :

- Pendampingan pengelolaan BUMDES dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- Membuka jaringan yang terkait dan dapat membantu perkembangan usaha tersebut.
- Pengembangan strategi pemasaran (*marketing*).
- Membantu dalam manajemen akuntansi atau keuangan
- Mentoring dan pelatihan bisnis.
- Manajemen pengelolaan perusahaan dan budaya perusahaan
- Memberi pengenalan dan penekanan atas etika bisnis.
- Membantu hal-hal terkait dengan regulasi.
- Memberikan informasi mengenai industri bisnis terkait secara umum.

Pada dasarnya yang dilakukan oleh inkubator bisnis adalah bagian dari program kemitraan untuk mengembangkan bisnis bersama-sama, dengan tujuan menjadikan usaha tersebut sebagai bisnis yang nyata dan berkembang sesuai dengan visi dari perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini program inkubasi sedang menjadi tren, mulai dari para pelaku bisnis khususnya UMKM/UKM. Hal ini dapat dipahami bahwa ditengah persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan Indonesia, inkubator telah menjadi harapan bagi banyak pihak untuk menjadi sebuah alternatif solusi bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha kecil adalah melalui program inkubator bisnis dan teknologi.

(Sumber petunjuk teknis Smart Village provinsi Lampung 2020)

3. *Smart Environment*

Lingkungan perdesaan dalam konteks *Smart Village* tidak hanya diartikan sebagai lingkungan alam yang ada di desa, melainkan keseluruhan elemen yang membentuk satu tatanan sosial dan alam yang mencirikan karakter dari desa. Lingkungan perdesaan dalam tatanan sosial terdiri dari adat, budaya dan struktur sosial. Dikaitkan dengan konteks *Smart Village*, pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan baik dalam tatanan lingkungan sosial maupun dalam tatanan lingkungan alam.

Dalam tatanan sosial, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat nilai adat, budaya dan struktur sosial yang ada, seperti pendataan, pendokumentasian serta pemanfaatan nilai adat dan budaya yang didasarkan kepada teknologi informasi yang ada. Teknologi informasi juga digunakan untuk mengkreasikan nilai adat dan budaya agar lebih bisa dikontekstualisasikan dengan keadaan saat ini tanpa menghilangkan esensi dari adat dan budaya tersebut. Di sisi lain, nilai adat dan budaya dapat dijadikan menangkal nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai adat dan budaya yang ada di desa. Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam konteks tatanan sosial di desa, maka akan menciptakan kelestarian struktur sosial yang selama ini ada.

Bahkan, nilai adat dan budaya yang terdapat di dalam struktur sosial tersebut dapat dikembangkan, dilestarikan sesuai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang. Konteks pemanfaatan teknologi informasi dalam tatanan alam dapat digunakan dalam identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan teknologi informasi jangan merusak tatanan alam yang ada, tetapi harus berperan untuk memberikan cara dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memanfaatkan alam secara proporsional, seperti pemanfaatan

teknologi informasi bidang pertanian berupa tersedianya informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan bagi petani di desa agar para petani dapat menentukan rencana pola tani, pemanfaatan teknologi tersebut pada akhirnya selain akan meningkatkan keterampilan para petani, juga akan meningkatkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

4. *Smart Government*

Struktur desa menempatkan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perkembangan dan kemajuan desa, sehingga hampir seluruh kebijakan yang menyangkut desa akan senantiasa memperhatikan keberadaan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa, masyarakat menjadi dasar dan tujuan dari penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa tersebut. Hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi suatu keharusan. Hubungan tersebut harus terjalin dalam berbagai aspek yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi harus mampu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Teknologi informasi dijadikan sebagai media untuk menghubungkan keduanya. Di satu sisi, teknologi informasi dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai media untuk menyampaikan berbagai layanan kepada masyarakat baik itu layanan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai alat yang mampu mempermudah pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, teknologi informasi dijadikan sebagai alat oleh masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa, baik itu layanan penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan pembangunan desa.

(Sumber petunjuk teknis Smart Village provinsi Lampung 2020)

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengelompokkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pembahasan masalah penelitian yang sama yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 .Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis Dan Tahun	Metode	Hasil penelitian
1	E-government Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung	Agus (2015)	Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif	Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Era globalisasi sekarang ini sangat diperlukan adanya teknologi informasi untuk mengimbangi adanya perkembangan informasi. Salah satunya dengan membuat E- Government yang dapat dijadikan tempat berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lainnya, misalnya dengan investor. Pergeseran

				<p>paradigma ini dapat dimaknai bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sejak tahap perencanaan untuk mengetahui tentang jenis yang terbaik, mekanisme pemantauan maupun evaluasi dalam pelayanan, sehingga tanggung jawab dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya dipihak penyedia layanan, tetapi masyarakat ikut tanggung jawab.</p>
2	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i></p>	<p>Richard (2017)</p>	<p>Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat merupakan terobosan penting untuk meminimalisir terjadinya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Berangkat dari persoalan kursial di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul</p>

				<p>“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>”.</p>
3	<p>Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Government 2.0(Studi Kasus Halaman Facebook Ridwan Kamil)</p>	<p>Vita, dkk (2017)</p>	<p>Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan vivo dalam pengolahan data serta teknik netnography untuk mengkaji data lebih mendalam. Unit analisis adalah konten dari komentar facebook fanpage Ridwan Kamil. Tekniknetnography digunakan karena lebih efektif dan efisien dibandingkan teknik penelitian kualitatiflainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan government 2.0 yang dilakukan Ridwan Kamil yaitu berupa dukungan,</p>

				saran, kritik, keluhan, laporan, hingga berbagi pengetahuan.
4	Partisipasi Masyarakat Desa Ciburial Dalam Mendukung Program <i>Website</i> Desa.id Kementrian Komunikasi Dan Informatika	Lestriyani (2018)	Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif.	Dari hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat ciburial belum banyak terlibat dalam pengelolaan <i>website</i> , hanya orang-orang tertentu yang ada dipemerintahan saja yang turut membantu mengelola <i>website</i> . Selain itu, pembuatan konten-konten untuk <i>website</i> desa belum mendapat banyak sumbangan tulisan dari masyarakat. Begitupun dalam memberikan kritik/saran masih minim dilakukan. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Ciburial baru melakukan sosialisasi tentang keberadaan <i>website</i> . Pemerintah Desa belum membuat atau melakukan program khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun

				demikian, pemerintah desa memberikan dukungan berupa anggaran APBDes untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan program <i>website</i> desa.
--	--	--	--	---

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

Penelitian mengenai program *Smart Village* khususnya di Provinsi Lampung dirasa belum banyak, program ini pun baru diresmikan dalam Pergub Lampung pada tahun 2020, Maka dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa terdapat *perbedaan* antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, dimana kali ini peneliti memfokuskan kajian ini kepada partisipasi masyarakat yang dapat dilihat melalui lima jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, serta partisipasi dalam evaluasi.

Bahwa beberapa indikator tersebut dapat dijadikan acuan oleh peneliti untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village* di Desa Madukoro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori partisipasi masyarakat (Cohen dan Uphoff : 1997). Metode yang digunakan menggunakan menggunakan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dengan fenomena dari permasalahan yang diteliti.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu dengan menggunakan indikator partisipasi masyarakat sebagai acuan untuk menggunakan e-government sebagai alat untuk mengembangkan desa dengan kemajuan teknologi di era globalisasi dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian berdasarkan tabel penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah platform layanan E-Government yang kali ini diterapkan di desa-desa khususnya desa di Provinsi Lampung yaitu *Smart Village*.

2.3 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah konsep partisipasi dari John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. Sebenarnya Cohen dan Uphoff tidak pernah secara jelas mendefinisikan bagaimana pengertian partisipasi menurut mereka. Akan tetapi dalam jurnal mereka yang berjudul *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity* (1980), partisipasi yang mereka maksud kurang lebih memiliki pengertian yaitu keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya serta usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pembagian hasil dan evaluasi program.

Partisipasi bukanlah suatu hal yang bersifat kuantitatif, maka dari itu mereka berasumsi bahwa partisipasi tidak dapat diukur. Cohen dan Uphoff tidak setuju dengan teoritis lainnya ketika memberlakukan partisipasi sebagai sesuatu yang dapat diukur. Dalam melihat partisipasi, Cohen dan Uphoff membayangkannya sebagai suatu rubrik yang terdiri dari kumpulan garisgaris yang saling menjelaskan satu sama lainnya. Kemudian, Cohen dan Uphoff memberikan empat jenis dalam proses partisipasi menurut mereka. Jenis partisipasi tersebut antara lain yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; (3) partisipasi mendapatkan

manfaat; dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Pada penelitian ini juga menggunakan teori pendukung yaitu teori struktur fungsionalisme.

Teori struktur fungsionalisme yang dicetuskan oleh Emile Durkheim ini berasal dari pemikiran ahli sosiologi Auguste Comte dan Herbert Spencer. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan adanya interaksi itu, hubungan manusia satu dengan manusia lainnya akan terjalin dengan baik. Interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain.

Dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, lingkungan ibadah, dan lingkungan-lingkungan lainnya pasti membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, berjalannya suatu lingkungan tak bisa dilepaskan dari peran atau fungsi manusia itu sendiri dalam suatu lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti memiliki tugasnya masing-masing dalam suatu lingkungan yang dimana setiap tugas itu disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Komponen-komponen yang akan di tempuh penelitian dalam menggali dan menganalisa data sebagai jawaban permasalahan diantaranya :

3.1 Tipe Penelitian Deskriptif

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Hardani, et Al, 2020: 54). Oleh karena itu, proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019: 9).

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi dan fenomena partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village*, maka teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan

di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, Makna disini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Berdasarkan hal itu penelitian ini memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat, dan penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam penerapan program *Smart Village* di Desa Madukoro.

3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dapat ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penentuan lokasi penelitian juga memperhatikan keterbatasan seperti geografis dan praktis di lapangan, meliputi waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu peneliti mempertimbangkan lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*puspositive*) yang kemudian penelitian ini akan mengambil Desa Madukoro sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Madukoro secara objektif dengan mempertimbangkan relevansi masalah yang akan dikaji dengan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Madukoro dalam upaya penerapan program *Smart Village* tersebut. Karena berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti mendapati bahwa di Desa Madukoro belum sepenuhnya siap dalam menerapkan program *Smart Village* ini, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2019: 209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian.

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:

- a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
- b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
- c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
- d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Fokus penelitian ini yaitu Partisipasi masyarakat di Desa Madukoro dapat dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016) :

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat
- d. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi maupun keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan kita teliti (Sugiyono, 2019).

Pendapat Spradley dalam Sugiyono (2019) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimina informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menetapkan informan penelitian diantaranya adalah :

1. Masyarakat Desa Madukoro yang ikut serta dalam partisipasi dalam pengembangan program *Smart Village*.
2. Pemerintah Desa Madukoro seperti, kepala desa dan aparatur Desa Madukoro.

3.5 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019: 225). Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur serta observasi langsung oleh peneliti. Saat menetapkan informan, penulis menggunakan proses wawancara dan observasi. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Hardani et Al, 2020: 121). Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi mengenai partisipasi masyarakat Desa Madukoro dalam penerapan program *Smart Village* yang dikaji menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dengan teori sosiologi struktur fungsionalis.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian partisipasi masyarakat dalam penerapan program *smart village* di Desa Madukoro.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019).

Peneliti sebelumnya sudah melakukan pra riset, dengan demikian peneliti menggunakan observasi sistematis atau observasi berkerangka (*structured observation*) adalah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya (Hardani et Al, 2020: 131).

Kategori tersebut meliputi masyarakat dan perangkat Desa Madukoro yang bertugas di lingkungan pemerintahan desa yang akan dilakukan penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti akan mengamati dan melihat langsung kondisi di lapangan, seperti melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Madukoro dalam penerapan program *Smart Village*, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village*.

2) *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan atau yang memberi informasi. Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah dilakukan pada masyarakat di Desa Madukoro dan pemerintah Desa Madukoro. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penggalian data melalui wawancara adalah :

1. Jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam penerapan program *smart village*
2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Partisipasi dalam pelaksanaan.
4. Partisipasi dalam pengambilan manfaat dan
5. Partisipasi dalam tahap evaluasi.

Pada penelitian wawancara ini ditunjukkan kepada :

6. Masyarakat Desa Madukoro, karena sesuai dengan topik penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat Desa Madukoro.
7. Pemerintah Desa Madukoro yaitu kepala desa dan aparat Desa Madukoro.

Wawancara dilakukan terlebih dahulu menentukan sejumlah informan, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh data mengenai partisipasi masyarakat Desa Madukoro dalam penerapan program *Smart Village*.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, *handphone* untuk keperluan *recording*, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Hardani (2020: 163-167) pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam menyajikan data. Menurut Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland, (Miles dan Huberman, 1992) analisis kualitatif data yang dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan metransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani et Al, 2020: 167). Selanjutnya peneliti mengkaitkan data yang dihasilkan yaitu teori partisipasi masyarakat dengan teori sosiologi fungsionalis.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Hardani et Al, 2020 170-171).

Menarik kesimpulan yaitu sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, di mana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015: 372) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2015:373) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Pada teknik triangulasi data yaitu membandingkan apa yang dilakukan informan, dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yaitu masyarakat Desa Madukoro dan Pemerintah Desa Madukoro yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Berikutnya triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Waktu yang digunakan peneliti yaitu ketika pagi dan siang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Madukoro ditemukan jawaban bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village* masih sangat rendah. berpacu pada teori Cohen dan Uphoff tentang jenis-jenis partisipasi masyarakat dimana terdapat empat jenis partisipasi masyarakat yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini,

- 1) Pertama dalam pengambilan keputusan didapati jawaban bahwa dari keterangan masyarakat, mereka belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan apapun.
- 2) Selanjutnya pada pelaksanaan sebagian masyarakat baru terlibat dalam pendataan serta sosialisasi yang di adakan di tiap RT dan RW, bahkan ada masyarakat yang belum terdata dalam website *Smart Village* Desa Madukoro.
- 3) Ketiga dalam proses pengambilan manfaat, berdasarkan keterangan yang didapat mayoritas masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari program ini dengan berbagai alasan contohnya masalah kurangnya pengetahuan dalam penggunaan gadget hingga data yang belum di input.
- 4) Terakhir dalam evaluasi masyarakat pun belum terlibat sama sekali, pemerintah pun belum memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran mereka terkait penerapan program ini.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah Desa Madukoro

Diharapkan agar terus untuk memberikan dukungan pemahaman berupa sosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Madukoro. Bentuk dukungan tersebut yakni berupa bantuan sarana dan prasarana fasilitas umum yang berhubungan dengan konsep *Smart Village* ke masyarakat. Hal ini perlu untuk dilakukan karena nantinya dapat membuat masyarakat berperan aktif dalam pengaplikasian program *Smart Village* berupa bentuk partisipasi dari segi pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat dan evaluasi. Selanjutnya masyarakat tidak jenuh sehingga semangat dan partisipasi mereka dalam kegiatan layanan administrasi dapat efektif dan efisien.

b. Bagi Masyarakat Desa Madukoro

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk menggerakkan partisipasi diri agar nantinya masyarakat tersebut turut berpartisipasi untuk mengubah daerah mereka menjadi lebih baik.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan perspektif tindakan partisipasi masyarakat dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village*. Maka dari itu kemudian dapat dilakukan penelitian selanjutnya dengan berfokus bagaimana pengaruh struktur di Desa Madukoro. Karena berdasarkan

penemuan peneliti, partisipasi masyarakat dalam penerapan program *Smart Village* juga mendapatkan pengaruh dari struktur yang ada disana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo, (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
- Hadi, A. P. (2015). *Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunann*. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya. 1987, 1–14.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104.
- Hayati, N. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. *Administrasi Negara*, 5, 5375–5388.
- Huda,Hafni Aisyatul,dkk.(2020).*Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)*. *Jurnal Moderat*. Vol 6. No 3
- Kadmaerubin Richard. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Untuk Mewujudkan Governance*. Skripsi. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa.

Kaehe, diradimalata. dkk. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung pintareng kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*. Jurnal development. Volume 1 nomor 1.

Nugraha, Yusuf. (2020). *Kajian Penggunaan Konsep Smart Village dalam Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan*. Jurnal Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 6. No 2.

Peraturan Gubernur Lampung nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* di Provinsi Lampung.

Supriadi, Ahmad, dkk. (2016). *Membangun Sistem Smart Village Untuk Menciptakan Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri di Desa Alas tengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Berbasis Android*. Jurnal Sentia. Vol 8. No 1.

Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/71/V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Desa Locus Program *Smart Village* di Provinsi Lampung.

Putri Lestyarini Cindara. (2018). *Partisipasi Masyarakat Desa Ciburial Dalam Mendukung Website Desa.id Kemntrian Komunikasi dan Informatika*. Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Pusvita Vita, dkk. (2017). *Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Government 2.0 (Studi Kasus Halaman Facebook Ridwan Kamil)*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. Volume 06 Nomor 01.

Riskayanti (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar. Program studi ilmu administrasi negara, fakultas sosial dan politik universitas Muhamadiyah Makassar.

Salafian Jen. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Good Governance Melalui E-government di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Setiawan agung. (2015). *E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung*. Jurnal istem informasi, Volume 03 Nomor 01.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.